

**PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING OLEH PEMERINTAH
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUHAMMAD RIVIO PUTRA
2010012111130

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

No.Reg: 38/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

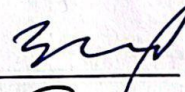
No.Reg : 38/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Rivio Putra**
NPM : **2010012111130**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh
Pemerintah Kota Padang.**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

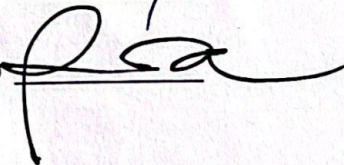
1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

(Pembimbing 2)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Muhammad Rivio Putra¹, Boy Yendra Tamin¹, Resma Bintani Gustaliza¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: viooputra86@gmail.com

ABSTRACT

Prices of basic necessities and important goods often experience price instability in the City of Padang with the Mayor of Padang Regulation Number 43 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Trade Service. The problem formulation is: 1. What are the forms of supervision carried out by the Padang City Regional Government in carrying out supervision regarding price stabilization of basic necessities and important goods? 2. What are the obstacles in implementing supervision of price stabilization of basic necessities and important goods by the Padang City Government. 3. What efforts have been made by the Padang City Regional Government to overcome obstacles in carrying out supervision of price stabilization matters for basic necessities and important goods. This research is sociological juridical legal research. The data sources used were primary data and secondary data, analyzed qualitatively. The results of the research and discussion are: 1) The form of monitoring the implementation of price stabilization matters is carried out by collaborating with central and regional government agencies, carrying out low-cost market operations, and making policies and monitoring. 2) Obstacles found were lack of information related to the implementation of cheap market operations, community habits, and climate change. 3) Efforts made were to improve communication with sub-district and sub-district governments, increase cooperation, supervision, ensure stock availability, and monitor prices of goods.

Keywords: Supervision, stabilization, prices, basic necessities and important goods

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Padang, harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan 1444 H. Komoditas yang mengalami peningkatan harga adalah daging ayam sebesar 35 persen. Jika sebelumnya di awal Maret 2023, harga daging ayam rata-rata per kilogramnya adalah Rp.28.000,00, maka pada pertengahan Maret 2023 (23 Maret 2023) harganya naik menjadi Rp.38.000,00 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut juga diikuti dengan kenaikan harga telur, cabai merah, dan bawang merah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga

barang kebutuhan pokok dan penting dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan urusan

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting?

2. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahendri Barkah selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dan Ibu Dewi Reno Fitri selaku Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Padang menyatakan bahwa Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu:

1. Kerja Sama Dengan Berbagai Instansi Pemerintah

Pelaksanaan pengawasan stabilisasi harga bapokting oleh Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi maupun antar organisasi perangkat daerah di Kota Padang.

2. Kegiatan Operasi Pasar Murah

Operasi pasar murah merupakan kegiatan berbasis penjualan barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa penjualan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yang bekerjasama dengan penyedia bapokting yang ditujukan kepada masyarakat dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Padang.

3. Pemantauan dan Kebijakan

Pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di setiap titik pasar yang ada di Kota Padang menempatkan beberapa petugas untuk memantau harga yang dilakukan setiap hari dan hasil dari pemantauan tersebut dilaporkan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang

1. Kendala Dalam Kegiatan Operasi Pasar Murah

Dalam melakukan operasi pasar murah pihak Dinas Perdagangan Kota Padang juga mengalami kesulitan dalam penyediaan fasilitas terhadap pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi pelaku dalam kegiatan operasi pasar murah. Fasilitas yang kurang tersebut berupa tenda-tenda untuk berjualan.

Dalam pelaksanaan antara Dinas Perdagangan Kota Padang hanya melakukan komitmen dengan pelaku usaha UMKM tanpa adanya sanksi yang berikan ketika pelaku usaha tidak hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan pasar murah.

2. Kebiasaan Masyarakat Di Kota Padang

Kendala ditemukan pada kebiasaan yang dimaksud ialah ketika menjelang hari-hari besar, masyarakat selalu berbondong-bondong dalam membeli barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah relatif banyak untuk memenuhi stok.

3. Perubahan Cuaca

Cuaca yang tidak menentu, membuat pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Padang juga berpengaruh, seperti gagal panen oleh petani, adanya bencana alam, dan bahkan distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Kota Padang mengalami keterlambatan pengiriman barang, karena barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Padang juga banyak berasal dari luar kota.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting

1. Upaya Terhadap Kendala Operasi Pasar murah

Mengatasi kendala terkait kegiatan operasi pasar murah, upaya yang dilakukan adalah dengan menekankan kembali kepada pihak kecamatan dan kelurahan untuk aktif memberikan informasi terkait pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat.

2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dari Kebiasaan Masyarakat Kota Padang

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang adalah mengelola ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Padang.

Dinas Perdagangan juga mengingatkan dan menghimbau masyarakat tidak perlu membiasakan kebiasaan itu dan tidak perlu cemas dengan ketidaksediaan stok barang

3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Berasal Dari Perubahan Cuaca

Upaya yang dilakukan adalah selalu melakukan pengecekan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan melakukan kerja sama dengan mitra-mitra lain seperti Dinas Pertanian Kota Padang dan Dinas Pangan Kota Padang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan yaitu kerjasama dengan berbagai

instansi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, melakukan kegiatan operasi pasar murah, dan pemantauan harga dan kebijakan.

2. Kendala-kendala yang ditemukan adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan operasi pasar murah, kurangnya fasilitas berupa tenda yang tidak memadai untuk stand bagi pelaku usaha,
3. Upaya yang dilakukan, yaitu meningkatkan komunikasi dalam memberikan informasi terkait operasi pasar murah kepada masyarakat.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang lebih aktif lagi memberikan informasi terkait operasi pasar murah dengan memanfaatkan media sosial resmi disdag. padang.go.id milik Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Agar Pemerintah Kota Padang lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berlebihan agar harga menjadi stabil.
3. Agar Pemerintah Kota Padang melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dalam menanam bibit tanaman seperti cabai yang dapat ditanam oleh masyarakat di halaman rumah untuk mengantisipasi kenaikan harga yang disebabkan petani gagal panen, dan faktor-faktor lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Prenadamedia Grup, Edisi Pertama, Depok.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM

Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan

C. Sumber Lainnya

Sapuan Gafar, 2018, Quo Vadis Manajemen Kebutuhan Pokok, *Jurnal Pangan*, Vol.17, No 2.

Susi Tri Lestari, 2022, Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022

Lida Puspaningtyas, 2023, *Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Padang Mulai Naik*, Republika, 23 Maret 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrz5gn502/harga-sejumlah-kebutuhan-pokok-di-padang-mulai-naik>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. dan Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H